

RPJMN 2010-2014

- Makro: kebijakan perbaikan lingkungan usaha. Tantangan → persaingan, biaya transaksi, sumberdaya mahal.
- Meso: akses koperasi & UMKM kpd sumberdaya produktif. Tantangan → kelembagaan, akses modal, jaringan usaha, teknologi.
- Mikro: karakteristik & perilaku pelaku usaha. Tantangan → koperasi & UMKM tidak hanya memakai pola *business as usual*.

PARADIGMA BARU?

- Dari *charity* → ke *enabling, nurturing, enforcing*.
- Dari imbauan (*suasion*) → ke *affirmative action* (keberpihakan).
- Dari *steering* (mengendalikan) → ke *rowing* (mengarahkan).
- Dari *full exposure to competition* → ke *competitive attitudes with rational protection*.

TANTANGAN GLOBALISASI

Kerangka kebijakan: 1) nilai tukar mengambang, 2) masuknya modal asing, 3) transfer teknologi dari luar negeri, 4) aktifnya pasar modal.

Pengaruh positif: memaksa efisiensi pelaku usaha domestik, perubahan struktur industri, inovasi untuk ekspor.

Pengaruh negatif: persaingan ketat membunuh pelaku usaha yg lemah, konsumerisme pd produk luar negeri, melemahnya basis ekonomi kerakyatan.

TANTANGAN LIBERALISASI

Kerangka kebijakan: 1) penghapusan tarif, 2) industri berorientasi ekspor, 3) kerjasama wilayah perdagangan.

Asumsi positif: peningkatan arus barang dan jasa, akses terhadap produk yg murah & berkualitas.

Asumsi negatif: komitmen setiap negara tidak konsisten, proteksi masih dilakukan negara maju (eco-labeling, proteksi “industri strategis”, dsb).

FASILITASI PEMERINTAH PUSAT

1. Semangat implementasi UU No.20/2008. Prinsip (ps.4): 1) Kemandirian, 2) Kebijakan publik yg baik, 3) Usaha berbasis potensi daerah, 4) Daya-saing UMKM, 4) Penyelenggaraan terpadu.
2. “Revolusi” kemandirian ekonomi rakyat
3. Suharto (Depkop); Gus Dur (Kemenkop & BPSKUKM); Megawati (Kemenkop & UKM plus tugas teknis) → SBY: Perpres No.9/2005: Hapus kewenangan teknis Menkop & UKM?
4. Jangka menengah → Perbarui komitmen pada pemberdayaan koperasi dan UMKM.

FASILITASI PEMERINTAH DAERAH

1. Manfaatkan “belanja modal” dalam APBD untuk pemberdayaan koperasi & UMKM
2. Pemberdayaan bukan hanya “aktivitas yang menyedot dana” ?
3. Pelaksanaan PP 38/2007 & PP 41/2007 harus mengakomodasi kebutuhan pemberdayaan koperasi & UMKM. → Revitalisasi Dinas Perindagkop.

Struktur Kebijakan Pemberdayaan Usaha Kecil

Komponen:

- Sektor bisnis
- Struktur pendukung (bisnis, lingkungan, desain, keuangan)
- Pasar
- Kaitan, jejaring, dan interaksi
- Budaya dan struktur sosial

Sub-sistem Inovasi Bisnis:

- UMKM yang inovatif
- Jejaring informal dari para inovator
- Penularan / aplikasi (*spin-offs*)
- Pendanaan inovasi
- Modal ventura
- Nilai lingkungan dan sosial yang mendukung inovasi

Sub-Sistem Pengetahuan:

- Ilmuwan / akademisi
- Lembaga riset
- Lembaga pelatihan
- Standar, paten
- Lembaga regulasi sektoral
- Lembaga pengembangan dan difusi
- Asosiasi teknis dan profesional

Kebijakan Insentif

Kebijakan Ekonomi Makro

Kebijakan Ekonomi Mikro

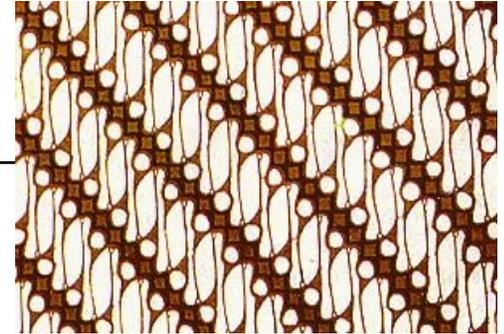
Perlindungan Paten

- Paten terdapat dalam banyak produk sederhana dan dijumpai sehari-hari.
- Lem yang digunakan untuk **Post-it** ditemukan secara tak sengaja oleh 3M. Setelah dipatenkan, produk ini menghasilkan keuntungan besar bagi perusahaan ini.
- **Ring-pull can**: Penemu memberikan lisensi sistem ini ke Coca-cola seharga **1/10 penny per kaleng**. Selama paten ini masih dipakai, royalti yang diperoleh penemu mencapai 148.000 pound per hari.



Paten milik Indonesia?

Motif batik “parang-rusak”,
masih milik kraton Jogja?



Joger: kata pelesetan
sebagai *trade-mark*.

Dagadu; desain kaos
dengan parodi.



AKSES MODAL: MASIH MENDUA?

-
- ❑ PBI No.3/2/2001 ttg KUK → menganjurkan, bukan mewajibkan penyaluran KUK oleh bank komersial
 - ❑ Pasca bencana Jogja: kredit macet UMKM Rp 329 M. → PBI No.8/10/2006 ttg perlakuan khusus UMKM pasca bencana
 - ❑ *Haircut* setelah kredit macet sejak 1980-an.
 - ❑ Tahapan fasilitasi sesuai kriteria UMKM.
 - ❑ Mengapa sinyal pemerintah tidak selalu jelas?

KOORDINASI KEBIJAKAN

- Lebih dari 30 program pendampingan teknis koperasi & UMKM → tersebar di beberapa departemen.
- Paradoks: tahun 2007, realisasi kredit UMKM turun 2,3%, tetapi terdapat Rp 230 triliun dana pemerintah mandeg di SBI.
- Kemenkop-UMKM vs. Depkeu; belanja sosial vs belanja modal
- Di daerah: ijin baru swalayan terus diberikan, PKL dikejar-kejar Satpol PP.

PEMERINTAH HARUS MENUNJANG *BEST PRACTICE*

1. Inti-plasma
2. Sub-kontrak
3. Waralaba (*franchise*)
4. Perdagangan umum
5. Distribusi & keagenan
6. Bentuk kemitraan lain: bagi-hasil, KSO, *joint-venture, outsourcing*.



SEKIAN

Terima Kasih